

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KELURAHAN PANIKI BAWAH KECAMATAN MAPANGET KOTA
MANADO**

SINDY ELISABETH BOJOH

FEMMY TULUSAN

SALMIN DENGO

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the supervision of the Sub-District Head in the administration of village governance in the Mandolang District of Minahasa Regency. This study uses a descriptive-qualitative approach. The research informants were the Mandolang Sub-District Head, Mandolang District Government Section Head, two Village Heads, two BPD chairmen, and two LPM chairmen; a total of 10 informants. Data collection uses interview guidelines, while the analytical technique used is the analysis of interactive models from Miles and Huberman. Based on the results of data analysis, conclusions were drawn: (1) Direct Sub-District Head oversight of village administration is carried out well through observation, observation or direct examination of the village carried out by the Sub-District Head alone or through the assignment of subordinates; (2) Sub-district Head indirect supervision is carried out by requesting periodic written reports (every month, quarterly, and every six months) regarding village administration, and village government performance reports at the end of the fiscal year. Indirect supervision also requests oral and explanatory reports to the village head at the sub-district coordination / evaluation of sub-district. Based on this research it is recommended: (1) The Sub-District Head should go down to villages more often to monitor, observe or directly check the running of village administration. (2) The Sub-District Head should check / verify the truth of the written report by visiting the village and having a dialogue with the BPD, LPM, and local village community leaders.

Keywords: Supervision, Sub-District Head, Village Government.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim negara kesatuan Republik Indonesia. Otonomi seluas-luasnya bermakna bahwa daerah

diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi/hukum, agama); Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan otonomi seluas-luasnya tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dalam sistem penyelenggaraan otonomi daerah posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum (UU.No.23 Tahun 2014).

Sejalan dengan Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut, maka Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menjelaskan bahwa sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, Camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/walikota yang dilimpahkan; sedangkan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas.

Berelson dalam Handayani (2000) mengartikan efektivitas (effectivity atau effectiveness) adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Chester Barnard dalam Gibson, Ivancevich dan Donnelly, (2002) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (2002) menyebutkan pengertian efektivitas adalah terjadinya sesuatu efek atau akibat yang di kehendaki.

Peter Drucker dalam Stoner dan Wankel, (2006) membedakan pengertian efektivitas dengan efisiensi. Dikatakan, efektivitas adalah “menjalankan pekerjaan yang benar” dengan kata lain menurut pendapat ini bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan/sasaran yang tepat; seseorang yang efektif adalah seseorang yang memilih pekerjaan yang benar untuk dilaksanakan. Sedangkan efisiensi berarti “menjalankan pekerjaan dengan benar” atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar.

Pemerintahan Kelurahan.

Kata “Pemerintahan “ dalam bahasa Inggris disebut “government” kata government ini berarti pemerintah atau pemerintahan. Menurut kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2002), kata pemerintah mengandung arti “kekuasaan memerintah atau badan yang memerintah”, sedangkan pemerintahan mengandung arti perbuatan memerintah.

Mariun dalam Siswanto (2000) menjelaskan perbedaan pengertian pemerintah dan pemerintahan, dimana istilah pemerintahan menunjuk kepada bidang tugas pekerjaan atau fungsi; sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada badan, organ atau alat perlengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan itu. Inu Kencana (2003) juga menjelaskan bahwa istilah pemerintah berarti badan atau organ yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara; sedangkan pemerintahan berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan-badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Suradinata dalam Inu Kencana (2003) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Moleong (2006) mengatakan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Fokus Penelitian

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini ialah efektivitas pelaksanaan tugas Lurah penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai keberhasilan Lurah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan dibidang urusan pemerintahan umum, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang mengalami langsung atau yang mengetahui peristiwa yang diteliti.

Sesuai dengan fokus penelitian maka informan penelitian (sumber data) dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah kecamatan, Lurah dan Perangkat Kelurahan, dan tokoh/pemuka masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Lurah Paniki Bawah : 1 orang;
- 2) Sekretaris Lurah : 1 orang;
- 3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan : 1 orang;
- 4) Staf/Pelaksana : 3 orang.

Jenis Data

Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini untuk menjawab masalah penelitian adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian. Data primer yang dikumpulkan adalah data bersifat kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Kelurahan Paniki Bawah. Data sekunder yang terkumpulkan berfungsi sebagai pelengkap data primer, seperti data profil kelurahan, data SDM perangkat pemerintah kelurahan, dan data lainnya yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara (interview); yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan terlebih dahulu, dan diperluas dengan wawancara bebas guna mendalami data/informasi yang disampaikan oleh para informan dengan penggunaan teknik triangulasi.
2. Pengamatan (observasi); yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang terkait dengan focus penelitian yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
3. Penelaahan Dokumen; yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor Kelurahan Paniki Bawah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini

metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Moeljarto (2002). Proses analisis data model interaktif diawali dengan kegiatan mempelajari dan menelaah data (data collection), kemudian dilanjutkan dengan reduksi data (data reduction), selanjutnya penyajian data (data display), dan berakhir pada pembuatan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tentang Kelurahan Paniki Bawah

Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Paniki Bawah merupakan salah satu kelurahan dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Mapanget Kota Manado, yang terletak pada jarak ke ibu kota kecamatan sekitar 1 Km.

Adapun batas-batas wilayah letak Kelurahan Paniki Bawah adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kima Atas dan Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paniki Baru Kecamatan Talawaan, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan dan Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Maanget, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kairagi Dua dan kelurahan Buha Kecamatan Mapanget.

Luas wilayah Kelurahan Paniki Bawah secara keseluruhan yaitu 750 Ha, dengan penggunaannya sebagai berikut :

Pemukiman penduduk :250 Ha;

Lahan Pertanian/Perkebunan :350 Ha;

Lahan Perkantoran :16,8 Ha;

Lahan Pekarangan :61 Ha;

Lahan Prasarana Umum Lainnya :71,2 Ha;

Keadaan Penduduk Jumlah penduduk Kelurahan Paniki Bawah sampai dengan Desember 2018 sebanyak 12.175 jiwa terdiri dari laki-laki 6.194 jiwa atau 50,87% dan perempuan 5.981 jiwa atau 49,13%, dan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.739 KK. Kepadatan penduduk adalah 200 jiwa per Km².

No.	Mata Pencapaian/Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Petani	80	3,17
2.	Buruh Tani	139	5,50
1.	PNS	515	20,39
4.	Karyawan Swasta	1556	61,62
5.	Anggota TNI/POLRI	155	6,14
6.	Pensiunan	108	4,28
7.	Karyawan BUMN	83	3,29
8.	Wiraswasta	499	19,76
9.	Pedagang Kecil	20	0,79
10.	Tukang	110	4,36
11.	Dokter Swasta dan Bidan/Parawat	51	2,02
12.	Montir	21	0,83
13.	Lainnya	869	34,41
Jumlah		2.525	100,00

Sumber : Profil Kelurahan Paniki Bawah, 2018.

Penduduk Kelurahan Paniki Bawah berasal dari beberapa suku bangsa yaitu Minahasa, Jawa, Gorontalo, Sanger, dan Bantik, namun

Penduduk Kelurahan Paniki Bawah mempunyai pendidikan formal yang memadai, seperti dapat dilihat dari data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan pada Tabel 1. Dan pada Tabel 2 Komposisi Jumlah Penduduk Kelurahan Paniki Bawah menurut Tingkat Pendidikan (Keadaan s/d Desember 2018)

Sumber : Profil Kelurahan Panuki Bawah Tahun 2018.

Penduduk Kelurahan Paniki Bawah sebagian besar memeluk agama Kristen, dan selebihnya memeluk agama Islam, dan Katolik, Budha dan Hindu. Data tentang jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada Tabel 3 Komposisi Jumlah Penduduk Kelurahan Paniki Bawah menurut Agama (keadaan s/d Desember 2018)

mayoritas adalah berasal dari suku bangsa

No.	Agama	Jumlah (jiwa)	Persentase
1.	Islam	2.725	2,39
2.	Katolik	1.791	14,71
3.	Kristen Protestan	7.361	62,10
4.	Hindu	37	0,30
5.	Budha	61	0,50
Jumlah		12.175	100,00

Manado. Fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai keberhasilan Lurah dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan dibidang

urusan pemerintahan umum, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan tugas Lurah diamati dengan berlandaskan pada konsep dimensi efektivitas organisasi dari Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2008), yaitu : produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan perkembangan. Dimensi efektivitas tersebut dijabarkan sebagai berikut : (1) Produksi, adalah capaian hasil pelaksanaan tugas lurah yang diprogramkan dalam renstra dan renja; (2) Efisiensi, adalah kemampuan lurah dalam menggunakan atau mengerahkan sumberdaya organisasi yang dimiliki dengan tepat untuk pelaksanaan tugas; (3) Kepuasan, adalah kepuasan pegawai kelurahan atas capaian hasil pelaksanaan tugas lurah; (4) Adaptasi, adalah kemampuan lurah dalam menanggapi dan menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat; (5) Perkembangan, adalah perkembangan capaian hasil program/kegiatan pelaksanaan tugas lurah.

1. Produksi :

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “produksi” (pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah kelurahan (lurah) yang ditetapkan dalam renstra dan renja pada setiap tahun anggaran), para informan menjawab seperti berikut ini.

a. Informan “Donny M.T (Lurah) mengatakan : Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) pemerintah kelurahan, dan mengacu pada arah kebijakan pemerintah Kota Manado, maka seetiap tahun anggaran dibuat/ditetapkan program/kegiatan pemerintah kelurahan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, di bidang pelayanan umum, di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Program/kegiatan meliputi bidang Program/kegiatan yang ditetapkan dilaksanakan oleh semua satuan/unit organisasi (seksi-seksi) yang ada dalam struktur organisasi pemerintah kelurahan. Semua program kerja/kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja (renja) pada setiap anggaran dapat diimplementasikan. Tingkat capaian atau realisasi hasil semuanya baik yaitu berkisar antara 86% s/d 100%. Program/kegiatan yang tidak mencapai hasil maksimal disebabkan adanya kendala teknis.

b. Informan “Meyda W.” (Sekretaris Kelurahan), mengatakan : program/kegiatan di bidang pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh lurah pemerintahan kelurahan dengan tingkat capaian hasil selalu baik pada setiap tahun anggaran yaitu di atas 85% rata-rata pertahun. Program/kegiatan di bidang pelayanan umum/masyarakat yang dilaksanakan adalah pelayanan umum yang merupakan tupoksi atau kewenangan pemerintah kelurahan dengan tingkat capaian baik yaitu di atas 85% rata-rata pertahun. Program di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan adalah yang sudah ditetapkan dalam

musreimbang dengan capaian realisasi rata-rata di atas 90%.

2. Efisiensi.

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “efisiensi” (ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM, sumber daya financial atau keuangan/biaya, dan sarana/fasilitas kerja untuk pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah kelurahan yang sudah direncanakan/ditetapkan pada setiap tahun anggaran), para informan menjawab seperti berikut ini.

- a. Informan “Donny M.T (Lurah), mengatakan : Sebagai lurah kami berusaha agar SDM pegawai pemerintah kelurahan dapat didayagunakan dengan baik dan optimal untuk pencapaian realisasi program/kegiatan pemerintahan kelurahan yang sudah ditetapkan; Kami juga berupaya agar para pegawai/perangkat kelurahan dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan berhasil dengan mengerahkan potensi SDM yang ada pada diri mereka masing-masing. Hasilnya ternyata cukup baik dimana potensi SDM semua pegawai yang ada dapat didayagunakan dengan cukup optimal. Mengenai efisiensi penggunaan dana/anggaran, juga diupayakan dapat digunakan secara tepat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan; namun seringkali tidak terwujud/tercapai secara optimal karena dana yang ada masih minim dan seringkali ada peningkatan biaya operasional karena peningkatan tugas

pekerjaan. Namun demikian secara keseluruhan penggunaan dana/anggaran pemerintah kelurahan sudah cukup baik. Dalam hal penggunaan sarana dan fasilitas kerja untuk pencapaian hasil juga diupayakan digunakan dengan benar/tepat dan efisien.

- b. Informan “Mayda W” (Sekretaris Kecamatan), mengatakan : Pegawai perangkat pemerintah kelurahan ditempatkan pada unit/satuan organisasi (seksi/sub bagian) sesuai dengan kompetensi SDM masing-masing, dan mereka semua didorong untuk mengerahkan secara optimal potensi SDM yang dimiliki untuk keberhasilan pelaksanaan tugas. Anggaran yang ada digunakan sesuai peruntukannya, dan sejauh ini dapat direalisasikan dengan baik. Sarana kerja yang ada digunakan dengan tepat untuk pelaksanaan program/kegiatan, namun karena kondisinya masih kurang memadai sehingga penggunaannya kadang-kadang melebihi dari kondisi normal.

3. Kepuasan Pegawai :

Kepuasan pegawai dilihat dari sikap dan tindakan pegawai dalam menghadapi tugas-tugas rutin sehari-hari; sikap dan tindakan pegawai menanggapi peningkatan volume atau banyaknya tugas/pekerjaan; dan ketaatan pegawai terhadap waktu kerja. Jawaban para informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, adalah sebagai berikut :

- a. Informan “Donny M.T (Lurah), mengatakan : Selama ini tidak pernah ada pegawai pemerintah kelurahan Paniki Bawah yang tidak

melaksanakan tugas-tugas rutin sehari-hari sebab itu sudah merupakan tanggung jawab mereka; setiap tugas/pekerjaan rutin dihadapi dan dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Kalau ada peningkatan banyaknya tugas/pekerjaan atau kalau ada penugasan tertentu dari pimpinan, itu juga tetap dilaksanakan oleh pegawai dengan baik dan tuntas tanpa mengabaikan tugas/pekerjaan rutin mereka. Soal ketaatan kepada waktu kerja (kehadiran/absensi) itu diperhatikan oleh pegawai, sebab pelanggaran terhadap ketentuan kehadiran/absensi akan berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja atas tunjangan tambahan penghasilan pegawai.

b. Informan “Meyda W” (Sekretaris Kelurahan), mengatakan : tugas rutin merupakan tanggung jawab setiap pegawai untuk melaksanakan dan menyelesaikannya; dan sejauh ini pegawai selalu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan berhasil. Kalau ada peningkatan banyaknya tugas/pekerjaan maka biasanya pegawai menambah waktu kerja di kantor, dan tetap diselesaikan. Ketaatan terhadap peraturan waktu kerja merupakan bagian dari disiplin pegawai, sehingga kalau ada pelanggaran pasti akan mendapat sanksi pemotongan kinerja atau tunjangan tambahan penghasilan pegawai atau TPP.

4. Adaptasi/Fleksibilitas

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan “adaptasi/fleksibilitas” (kemampuan lurah atau pemerintahan

kelurahan dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul), para informan menjawab seperti berikut ini.

a. Informan “Donny M.T (Lurah), mengatakan : Sudah menjadi kewajiban lurah atau pemerintah kelurahan untuk melaksanakan semua tugas yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di kecamatan, maupun tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kecamatan. Kalau ada peningkatan banyaknya tugas atau ada penugasan dari pemerintah lebih tinggi pasti akan dilaksanakan tanpa harus mengorbankan pelaksanaan tugas-tugas rutin yang ada. Pada dasarnya kami pemerintah kelurahan harus siap melaksanakan penugasan dari pemerintah. Sebagai lurah kami juga selalu siap menghadapi dan menangani setiap persoalan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Pengalaman menunjukkan penugasan dari pemerintah atas atau tugas pembantuan yang datang dari pemerintah atas selalu dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan Paniki Bawah; demikian pula setiap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat dapat ditangani oleh pemerintah kelurahan, walaupun hasilnya kadang-kadang juga tidak maksimal.

b. Informan “Meyda W” (Sekretaris Kelurahan), mengatakan : Kalau ada peningkatan banyaknya tugas pekerjaan atau penugasan tertentu dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tau kecamatan, maka pemerintah kelurahan akan berupaya dapat melaksanakan dan menyelesaikan dengan baik walaupun hasilnya kadang-kadang tidak maksimal. Kalau penugasan dari pemerintah atau tugas pembantuan dari pemerintah banyak/luas maka kami pemerintah kelurahan bekerja ekstra.

5. Perkembangan :

Perkembangan organisasi dilihat dari kemampuan organisasi pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas (perkembangan kinerja) pada setiap tahun. Jawaban para informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, adalah sebagai berikut :

- a. Informan “Donny M.T (Lurah), mengatakan : Secara umum ada peningkatan kinerja pemerintah kelurahan pada setiap tahun selama beberapa tahun terakhir ini.
- b. Informan “Meida W” (Sekretaris Kelurahan), mengatakan : Pemerntah Kelurahan Paniki Bawah berusaha agar kinerja dapat meningkat terus pada setiap tahun; dan itu dapat dicapai dimana terjadi peningkatan capaian hasil program/kegiatan dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil wawancara dengan para informan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Paniki Bawah

Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagaimana dideskripsikan di atas, maka dapat dibuat rangkuman sebagai berikut :

Indikator/Kriteria Efektivitas

1. Produksi (capaian hasil pelaksanaan tugas lurah yang diprogramkan dalam renstra dan renja)
2. Efisiensi (kemampuan lurah dalam menggunakan atau mengerahkan sumberdaya organisasi yang dimiliki dengan tepat untuk pelaksanaan tugas)
3. Kepuasan Pegawai (Sikap dan tindakan pegawai dalam menghadapi tugas rutin dan tugas tambahan yang doiberikan oleh Lurah.
4. Adaptasi/fleksibilitas (kemampuan lurah dalam menanggapi dan menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan pemerintah dan masyarakat).
5. Perkembangan (perkembangan capaian hasil program/kegiatan pelaksanaan tugas lurah)

Rangkuman Hasil Penelitian:

1. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja dapat dilaksanakan, namun realisasi atau tingkat capaian hasil ada yang kurang maksimal. Realisasi atau capaian hasil dari target yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan sebagian maksimal, sebagian lainnya ada yang tidak maksimal namun tingkat capaiannya cukup baik.

2. Potensi SDM pegawai kelurahan dimanfaatkan dan didayagunakan dengan cukup baik oleh lurah, dimana para pegawai ditempatkan pada satuan kerja sesuai dengan kompetensi. Dana/anggaran yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dapat direalisasikan atau digunakan dengan cukup tepat, namun capaian atau realisasinya untuk program/kegiatan tertentu ada yang tidak maksimal. Sarana kerja yang ada atau dimiliki pemerintah kelurahan digunakan secara tepat untuk pelaksanaan atau pencapaian realisasi program/kegiatan yang sudah ditetapkan, namun karena sarana kerja yang ada masih kurang memadai sehingga penggunaannya sering melebihi kapasitasnya.
3. Sikap dan tindakan pegawai kelurahan dalam menghadapi tugas-tugas rutin sehari-hari cukup baik dimana semua tugas rutin yang dinerikan lurah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hasil capaiannya umumnya cukup efektif. Sikap dan tindakan pegawai dalam menanggapi adanya peningkatan banyaknya tugas pekerjaan atau adanya penugasan tertentu di luar tugas rutin juga cukup baik dimana para pegawai tetap melaksanakan dan menyelesaikannya tanpa mengabaikan tugas rutin mereka.
4. Kemampuan lurah (pemerintah kelurahan) dalam menghadapi atau menanggapi perkembangan atau peningkatan banyaknya tugas cukup baik dimana setiap ada peningkatan tugas umumnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Kemampuan lurah atau pemerintah kelurahan menghadapi

atau menanggapi adanya penugasan tertentu dari pemerintah atas (pusat/provinsi/kota/kecamatan) juga cukup baik dimana setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cukup efektif. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas atau bidang kewenangan lurah atau pemerintah kelurahan dapat ditangani dengan cukup efektif.

5. Perkembangan kemampuan lurah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas cukup baik. Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan tupoksi terus mengalami peningkatan. Demikian pula kinerja atau keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan atau tingkat capaian hasil (kinerja) terus mengalami peningkatan pada setiap tahun anggaran.

Pembahasan

Pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas menekankan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Dalam pandangan teori sistem, organisasi dilihat sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Organisasi mengambil input dari sistem yang lebih luas (yakni lingkungan), kemudian memproses input-input itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (output). Oleh karena itu menurut pendekatan teori sistem bahwa kriteria

efektivitas organisasi harus menggambarkan seluruh siklus input – proses – output, tidak hanya output saja, dengan kata lain kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu tempat hidupnya organisasi.

Berdasarkan teori sistem tersebut maka dalam penelitian ini efektivitas pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilihat dari lima kriteria/dimensi efektivitas organisasi tersebut yaitu : produksi, efisiensi, kepuasan pegawai, adaptasi/fleksibilitas, dan perkembangan organisasi. Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dirangkum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Produksi

1. Hasil penelitian menunjukkan Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja baik untuk bidang urusan pemerintahan umum, urusan pelayanan umum, urusan pembangunan dan urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan, namun realisasi atau tingkat capaian hasil ada yang kurang maksimal. Realisasi atau capaian hasil dari target yang ditetapkan untuk setiap program/kegiatan sebagian maksimal, sebagian lainnya ada yang tidak maksimal namun tingkat capaiannya cukup baik.
2. Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan efektivitas pelaksanaan tugas lurah dilihat dari kriteria/dimensi

produksi nampaknya belum maksimal namun sudah cukup baik. Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bahwa lurah atau pemerintah kelurahan Paniki Bawah perlu meningkatkan kemampuan dalam menetapkan jumlah dan mutu program/kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi.

Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan potensi SDM pegawai kelurahan Paniki Bawah dimanfaatkan dan didayagunakan dengan cukup baik oleh Lurah dimana para pegawai ditempatkan pada satuan kerja sesuai dengan kompetensi. Dana/anggaran yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan dapat direalisasikan atau digunakan dengan cukup tepat, namun capaian atau realisasinya untuk program/kegiatan tertentu ada yang tidak maksimal. Sarana kerja yang ada atau dimiliki pemerintah kelurahan digunakan secara tepat untuk pelaksanaan atau pencapaian realisasi program/kegiatan yang sudah ditetapkan, namun karena sarana kerja yang ada masih kurang memadai sehingga penggunaannya sering melebihi kapasitasnya. Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah kemampuan lurah atau pemerintah kelurahan Paniki Bawah dalam menggunakan dan memanfaatkan secara tepat potensi SDM pegawai, sumberdaya finansial, dan sarana kerja perlu ditingkatkan.

Kepuasan Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan tindakan pegawai kelurahan Paniki Bawah dalam menghadapi tugas-tugas rutin sehari-hari cukup baik dimana semua tugas rutin dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hasil capaiannya umumnya cukup efektif. Sikap dan tindakan pegawai dalam menanggapi adanya peningkatan banyaknya tugas pekerjaan atau adanya penugasan tertentu di luar tugas rutin juga cukup baik dimana para pegawai tetap melaksanakan dan menyelesaikannya tanpa mengabaikan tugas rutin mereka. Ketaatan pegawai terhadap waktu kerja (absensi/kehadiran) dan waktu kerja efektif juga cukup baik. Implikasi penting dari hasil penelitian ini ialah perlunya meningkatkan kepuasan pegawai untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah kelurahan Paniki Bawah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

Adaptasi/fleksibilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan lurah atau pemerintah kelurahan Paniki Bawah dalam menghadapi atau menanggapi perkembangan atau peningkatan banyaknya tugas cukup baik dimana setiap ada peningkatan tugas umumnya dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Kemampuan dalam menghadapi atau menanggapi adanya penugasan tertentu dari pemerintah atas (pusat/provinsi/kota/kecamatan) juga cukup baik dimana setiap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan cukup efektif. Permasalahan yang muncul dalam masyarakat

yang menjadi ruang lingkup tugas atau bidang kewenangan pemerintah kecamatan dapat ditangani dengan cukup efektif. Ini memberi makna bahwa kemampuan lurah atau pemerintah kelurahan Paniki Bawah dalam menanggapi perubahan internal dan eksternal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Perkembangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan lurah atau pemerintahan kelurahan Paniki Bawah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas cukup baik. Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk melaksanakan tupoksi terus mengalami peningkatan. Demikian pula kinerja atau keberhasilan dalam melaksanakan program/kegiatan atau tingkat capaian hasil (kinerja) terus mengalami peningkatan pada setiap tahun anggaran. Ini artinya bahwa efektivitas pelaksanaan tugas atau pemerintah kelurahan Paniki Bawah dalam melaksanakan dan mencapai sasaran dari program-program dan kegiatan-kegiatannya terus meningkat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan tugas Lurah dilihat dari dimensi “produksi” belum maksimal namun sudah cukup baik. Meskipun realisasi atau capaian hasil dari

- program/kegiatan yang ditetapkan ada yang tidak maksimal, namun sudah cukup baik.
2. Efektivitas pelaksanaan tugas Lurah dilihat dari dimensi “efisiensi” belum maksimal namun sudah cukup baik. Pendayagunaan sumberdaya organisasi (SDM pegawai, dana/keuangan, dan sarana kerja) dilakukan dengan cukup baik untuk mengoptimalkan realisasi pelaksanaan dan pencapaian hasil program/kegiatan.
 3. Efektivitas pelaksanaan tugas Lurah dilihat dari dimensi “kepuasan pegawai” belum maksimal namun sudah cukup baik. Sikap dan tindakan pegawai dalam menghadapi tugas rutin maupun tugas tambahan atau penugasan tertentu cukup baik. Ketaatan pegawai terhadap ketentuan waktu kerja juga cukup baik.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Paniki Bawah, yaitu :

1. Dimensi produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas program/kegiatan dibidang urusan pemerintahan umum, pelayanan umum/masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dimensi efisiensi dapat ditingkatkan mendayagunakan secara tepat dan optimal potensi SDM pegawai, anggaran/dana, dan sarana kerja.
3. Dimensi kepuasan pegawai dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pemenuhan terhadap kebutuhan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. M. 2010, Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Kencana.
- Gie, Liang The, 2002, Ensiklopedi Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.
- Gibson,LJ, Ivancevich, Donnelly, 2008, Organisasi, terjemahan, Jakarta: Erlangga
- Handyaningrat, S. 2000, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Jakarta : Gunung Agung.
- Handyaningrat, S. 2002, Administrasi Pemerintahan Dalam Perkembangan Nasional, Jakarta : Gunung Agung.
- Kencana, I. 2003, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Yogyakarta : Refika Aditama.
- Moleong, L. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Redoskarya.
- Nurman, 2015, Strategi Pembangunan Daerah, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Pamudji, S. 2001, Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara.

Poerwadarminta, S. 2002, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Gramedia.

Robins, Stephen, P. 2004, Perilaku Organisasi, terjemahan, Yogyakarta: UGM.

Rohidi dan Moeljarto, 2002. Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI-Press.

Rusli, B, 2013, Kebijakan Publik, Bandung : Hakim Publishing.

Siswanto, 2000, Administrasi Pemerintahan, Bandung : Armico.

Siagian, P.S. 2002, Teori, Strategi dan Perumusan Kebijaksanaan Organisasi, Jakarta: Gunung Agung.

Stoner L. J dan Carles, W. 2006, Manajemen, terjemahan, Jakarta : Intermedia.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3ES.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Profil Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado.

e-

jurnal.lppmunsera.org/index.php/sawala/article/view/520.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/10996>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/7974>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12126>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/15430>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/12910>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7997>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7991>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/15431>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/7996>.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/9901>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16756>